



# BULETIN PARLEMENTARIA

NOMOR 946/II/II/2017 • FEBRUARI 2017



## DPR RI BERTEKAD SELESAIKAN RUU KEPALANGMERAHAN DALAM DUA MASA SIDANG

**5** DPR RI DUKUNG INDONESIA  
PERKUAT HUBUNGAN DENGAN  
IRAN

**10** KOMISI V DPR RI SIAP BANTU  
PERSOALAN INFRASTRUKTUR  
PEGUNUNGAN ARFAK

**GRATIS**  
TIDAK DIPERJUALBELIKAN

# DPR RI Bertekad Selesaikan RUU Kepalangmerahan dalam Dua Masa Sidang



Ketua Umum PMI Yusuf Kalla di dampingi Fahri Hamzah dan Komisi IX DPR RI

Ketua Komisi IX DPR RI Dede Yusuf Macan Effendy mengatakan, Rancangan Undang-Undang (RUU) Kepalangmerahan sudah 10 tahun digagas DPR RI melalui usul inisiatif. Namun, selama itu RUU ini belum selesai dibahas dan menjadi RUU inisiatif Pemerintah. Mengingat betapa pentingnya peran Palang Merah Indonesia (PMI), Komisi IX DPR RI mengupayakan RUU ini dapat diselesaikan dalam dua kali masa sidang.

Demikian ditegaskan Dede ketika menyampaikan pengantar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Ketua Umum Palang Merah Indonesia (PMI) Jusuf Kalla, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (08/02).

Dede yang didampingi Wakil Ketua DPR RI bidang Korkesra Fahri Hamzah dan Wakil-Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Saleh P. Daulay, Syamsul Bahri dan Ermalena menambahkan, organisasi yang bersifat sosial itu baru memiliki Kepres RIS No. 25

Tahun 1950 dan Kepres 246 Tahun 1963 sebagai payung hukumnya, maka perlu diperkuat dengan UU.

"Ini sangat penting, karena Indonesia salah satu negara yang sering mengalami bencana. Karena itu kita perlu menyegerakan RUU Kepalangmerahan ini, untuk memperkuat organisasi sosial ini," kata Dede.

Lebih lanjut politisi Partai Demokrat itu menjelaskan, mandeknya RUU ini karena masalah pemilihan logo palang merah atau

bulan sabit merah untuk PMI. Negara menunggu lahirnya UU ini apalagi di seluruh dunia hanya Indonesia dan Laos yang belum memiliki perangkat UU ini.

"Komisi IX DPR RI akan segera membahas RUU Kepalangmerahan ini, kawan-kawan juga kelihatannya tidak ada masalah, semuanya menyetujui," imbuh politisi asal dapil Jawa Barat itu.

Ketua Umum PMI Jusuf Kalla menjelaskan bahwa tugas kepalangmerahan adalah memberi pertolongan untuk kemanusiaan baik pada masa perang atau damai untuk mengurangi penderitaan sesama manusia. Organisasi pelaksana sesuai Konvensi Jenewa yaitu TNI (Militer Non Tempur) dan PMI (Relawan).

Wakil Presiden RI itu menjelaskan, prinsip lambang palang merah adalah sebagai pengenalan dan pelindung yang dapat dilihat secara jelas dari jauh. Dan prinsip ke 6 dari prinsip Gerakan Internasional Palang Merah ialah dalam satu negara hanya boleh satu perhimpunan nasional, Palang Merah atau Bulan Sabit Merah.

"PMI didirikan 17 September 1945 dan Ketuaanya Muhammad Hatta setelah itu Indonesia meratifikasi Konvensi Jenewa 1949 dengan UU No 59/1958 dan Wakil Presiden itu menggunakan lambang palang merah, dan kami hanya meneruskan, Selama ini perdebatan karena dianggap lambang agama, tapi kalau lambang agama itu panjang bawahnya, ini kan tidak," jelas JK.

Saat ini, masih kata JK, ada dua juta relawan terdiri dari PMR, KSR, TSR dan DDS pada Pengurus dan Markas diseluruh Provinsi dan Kabupaten atau Kota. PMI telah bekerja mulai perang kemerdekaan dan semua konflik bersenjata di Indonesia, membantu korban bencana di dalam maupun di luar negeri serta melakukan berbagai upaya sosial dan kesehatan.

Saat ini, sambungnya PMI memiliki 250 unit mobil ambulans, 75 unit mobil tangki air, 7 unit helikopter, 10 haglund (kendaraan segala medan) dan saat ini sedang membangun 1 pabrik kantong darah dan 1 fraksionasi darah. ■



# Fadli Zon: Parlemen Berperan Penting Dalam Terwujudnya Agenda SDGs

Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon menyatakan bahwa parlemen memiliki peranan penting dalam mendorong tercapainya agenda Sustainable Development Goals (SDGs). Hal tersebut disampaikan Fadli saat mengikuti Konrad Adenauer Stiftung (KAS) Young Political Leaders Caucus Meeting 2017 di Siem Reap, Kamboja. Ia hadir disana sebagai Presiden GOPAC (Global Organization of Parliamentarians Against Corruption).

“GOPAC sebagai bagian dari global stakeholder, berkomitmen agar agenda SDGs tidak hanya kuat di level global, namun juga terwujud nyata di tataran lokal. Dan setiap anggota parlemen memiliki peran penting dalam merealisasikan agenda SDGs melalui mandat konstitusinya. Baik itu melalui peran legislasi, budgeting, dan policy oversight,” paparnya.



Wakil Ketua DPR RI bidang Korpolkam Fadli Zon dalam acara KAS Young Political Leaders Caucus Meeting 2017 di Siem Reap, Kamboja

Pemberantasan korupsi menurut politisi Gerindra ini penting untuk menjamin pembangunan yang berkelanjutan sebagai tujuan dari SDGs. Terkait hal ini, ia mengingatkan bahwa korupsi merupakan penghalang utama masyarakat untuk merasakan kesejahteraan.

"Meskipun terjadi pertumbuhan ekonomi, tapi pada saat yang sama korupsi masih masif, maka dampak pertumbuhan ekonomi tidak akan dirasakan masyarakat. Sehingga butuh ikhtiar aktif anggota parlemen di seluruh dunia untuk mengawal dan memastikan agar pertumbuhan pembangunan bisa sampai di tengah masyarakat," tegasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Fadli juga menyampaikan peran aktif GOPAC dalam mendorong suksesnya agenda SDGs, terutama agenda no.16 dalam membangun institusi yang akuntabel dan transparan. Seperti terbentuknya kerjasama antara GOPAC, UNDP, dan Islamic Development Bank dalam menghasilkan Parliamentary

Handbook on SDGs pada 2016.

"Hadirnya kerjasama ini sangat strategis dalam memperkuat kesadaran anggota parlemen di seluruh dunia dalam mengawal agenda SDGs," imbuhnya.

Dalam kaitannya dengan pemuda, Fadli mengharapkan agar kelompok muda dapat mengambil peran lebih besar dalam mendorong agenda SDGs. Kelompok muda harus menjadi subjek aktif, bukan hanya sekedar objek dari agenda SDGs.

Konrad Adenauer Stiftung (KAS) Young Political Leaders Caucus Meeting 2017 berlangsung di Siem Reap Kamboja, berlangsung selama 2 hari, 2-3 Februari 2017. Kegiatan ini dihadiri kurang lebih 50 peserta kader muda partai politik se-Asia, dengan tema Impetus for Political Actors to

Foto: ©KAS/PA/Pr



## PENGAWAS UMUM

Pimpinan DPR RI

## PENANGGUNG JAWAB/KETUA PENGARAH

Achmad Djuned, S.H., M.Hum. (Plt. Sekjen DPR RI)

## WAKIL KETUA PENGARAH

Dra. Damayanti, M.Si (DEPUTI PERSIDANGAN)

## PIMPINAN PELAKSANA

Drs. Djaka Dwi Winarko, M.Si (Karo Pemberitaan Parlemen)

## PIMPINAN REDAKSI

Drs.Mohammad Djazuli, M.Si (Kabag Media Cetak)

## WK. PIMPINAN REDAKSI

Sugeng Irianto, S.Sos., M.A. (Kasubag Media Cetak),

Ahyar Tibi, S.H (Kasubag Media Analisis),

Nita Juwita, S.Sos (Kasubag MedSos dan Website)

## REDAKTUR

Mastur Prantono, Suciati, S.Sos

## SEKRETARIS REDAKSI

Bagus Mudjiharjanto

## ANGGOTA REDAKSI

Agung Sulistiono, SH, Rahayu Setiowati, Muhammad Husen,

Sofyan Efendi, Virgianne Meiske Patuli, Devi Iriandi, Hendra

Sunandar, Surahmat Eko, Ria Nur Mega

## REDAKTUR FOTO

Eka Hindra, Iwan Armanias

## FOTOGRAFER

Rizka Arinindy, Naefuroji, M. Andri Nurdiansyah, Jaka Nugraha,

Runi Sari Budiati, Jayadi Maulana, Arief Rachman, R. Kresno

P.D Moempoeni, Azka Restu Fadilah

## ADMINISTRASI FOTO

Hasri Mentari

## ALAMAT REDAKSI/TATA USAHA

Bagian Media Cetak & Media Sosial DPR RI

Gedung Nusantara II Lt. 3

Jl. Jend. Gatot Soebroto-Senayan, Jakarta

Telp. (021) 5715348, 5715350 Fax. (021) 5715341,

e-mail: DPR RI.pemberitaan@gmail.com, www.DPR

RI.go.id/berita

## PENERBITAN & DISTRIBUSI

### PIMPINAN PENERBITAN

Djustiawan Widjaya, S.Sos. M.AP (Kabag Penerbitan)

### WK. PIMPINAN PENERBITAN

Mediantoro, S.E (Kasubag Produksi),

Pesta Evaria Simbolon, S.E, M.Si (Kasubag Distribusi)

### STAFF PRODUKSI

Eko Murdiyanto, Subadri, S.E, Barliansyah,

Fathurahman, Mujiono

### SIRKULASI

Abdul Kahfi, S.Kom, Remon, Ifan,

Siti Rondiyah, Oji, Lamin, Arif

Telp. 021-571 5697 Fax. 021-571 5421

Email : penerbitanDPR RI@gmail.com

**HUBUNGI BAGIAN PENERBITAN UNTUK PERMINTAAN HASIL CETAK DAN DISTRIBUSI (GRATIS)**

**ISI BERITA DAN MATERI FOTO DILUAR TANGGUNG JAWAB BAGIAN PENERBITAN**

## Jangan Ada Makanan yang Terbuang Sia-sia

Wakil Ketua DPR RI bidang Korpolkam, Fadli Zon menerima kunjungan pengurus Yayasan Lumbung Pangan, dalam dialog, dua pihak ini membicarakan bagaimana cara supaya tidak ada makanan yang terbuang sia-sia, padahal di sisi lain masih banyak masyarakat yang membutuhkan. Jika ditelusuri berapa banyak makanan yang terbuang sia-sia dari hotel-hotel, restoran, super market dan tempat makan lainnya.



Pimpinan DPR RI didampingi Anggota DPR RI, menerima kunjungan pengurus Yayasan Lumbung Pangan

Jumlah pasti makanan yang terbuang berapa banyak belum ada kajian yang mendalam, namun sudah bisa dipastikan banyak kalangan yang membutuhkan makanan. Ke depan akan dibuat kajian sebagai data awal untuk digunakan sebagai dasar pembuatan

regulasi. "Kita belum tahu jumlahnya berapa ton per hari tapi pasti cukup banyak. Sementara di sisi lain banyak masyarakat yang belum beruntung membutuhkan itu," jelas Fadli di ruang kerjanya, Gedung Nusantara III, Selasa (07/02).

Spirit dari pertemuan ini untuk mencari

format regulasi, agar tidak ada makanan yang terbuang sia-sia. Dan bagi mereka yang membutuhkan bisa tercukupi. "Ini bukan makanan sisa dan juga bukan makanan kedaluarsa, tapi makanan yang masih layak untuk dimakan, memenuhi nutrisi dan gizi yang masih tetap baik," ungkap Fadli.

Wakil Ketua DPR RI Korkesra, Fahri Hamzah yang juga hadir mendukung rencana tersebut. Ke depan DPR RI bisa meminta ke pada para pengambil keputusan, Kementerian Perdagangan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, untuk duduk bersama-sama, memikirkan langkah tetap mengatasi hal tersebut.

"Kita pikirkan regulasi semacam apa yang bisa kita buat. Supaya super market, hipermart ini kita wajibkan agar makanan-makanan mereka itu jangan dibuang. Tetapi diberikan kepada mereka yang membutuhkan, melalui Food Bank ini, sehingga mereka bisa menyalurkan ke panti asuhan, ke masyarakat yang membutuhkan nutrisi di daerah-daerah tertentu," ungkap Fadli.

Negara yang sudah melakukan ini contohnya adalah Perancis dan Inggris. "Di negara seperti Perancis sudah dilakukan, dan sudah menjadi kewajiban sekarang ini. Food Bank ini kan bagian dari civil society, NGO masyarakat madani, perlu karena yang menjalankan kepedualian sosial," papar Fadli. ■

Foto: MPR/Infra

## Pendidikan Politik Harus Disesuaikan dengan Usia Anak

Wakil Ketua DPR RI Taufik Kurniawan menilai pendidikan politik kepada anak usia dini dirasa sangat penting. Namun, pemberian edukasi politik harus disesuaikan dengan kondisi dan usia anak. Suasana bermain atau kegiatan di sekolah, bisa menjadi salah satu pilihan dalam memberikan pemahaman politik kepada anak.

Demikian dikatakannya usai memberikan materi tentang DPR RI pada 92 siswa-siswi Kelas 4 Sekolah Dasar Cikal, Cilandak, Jakarta Selatan, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (07/02). Dalam kesempatan

itu, Taufik didampingi Anggota Komisi IX DPR RI Ahmad Riski Sadig.

"Kita berharap, pendidikan politik usia dini disesuaikan dengan masanya. Kalau masih berusia Sekolah Dasar, kan tidak mungkin diberikan bobot pemahaman

tentang DPR RI, akademik yang terlalu berat. Bisa dimunculkan melalui suasana permainan," kata Taufik.

Politisi F-PAN itu menambahkan, penerapan kehidupan berdemokrasi di lingkungan sekolah, bisa melalui pemilihan calon ketua kelas. Kendati masih duduk di kelas 4, anak-anak bisa dilatih melalui pemilihan salah satu anggota kelas, untuk menjabat ketua kelas.

"Kita ambil contoh misalnya pada saat pemilihan calon ketua kelas. Ini menjadi proses-proses yang tidak usah terlalu



substansif. Tapi iklim bermain menjadi salah satu masa dari anak-anak yang harusnya kita jangkau juga," imbuh Taufik.

Taufik pun mencoba menerapkan hal itu kepada seluruh siswa SD Cikal yang hadir. Ia menawarkan kepada siswa untuk mencalonkan diri menjadi calon ketua kelas. Pencalonan tidak harus melalui dorongan teman-temannya, namun bisa juga melalui kemauan pribadi. Ada 12 siswa maju ke mimbar untuk memperkenalkan diri, sekaligus mencari pendukungnya.

Masih dalam kesempatan yang sama, Taufik pun memberikan materi tentang tugas dan fungsi DPR RI, sekaligus mengenai struktur Kementerian dan Lembaga Negara. Siswa-siswi sangat antusias dalam memberikan pertanyaan kepada Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Ekonomi dan Keuangan itu.

"Semoga, hal ini menjadi salah satu proses pemahaman, untuk mewujudkan kecintaan berbangsa dan bernegara. Materi yang diberikan tidak terlalu berat, sehingga harapannya akan lebih memudahkan dalam memahami tugas dan fungsi DPR RI," harap politisi asal dapil Jawa Tengah itu.

Sementara itu, Anggota Komisi IX DPR RI Ahmad Riski Sadig (F-PAN) juga menjelaskan sejumlah tugas dan peran DPR RI di masyarakat. Ia menjelaskan, pada masa reses, Anggota Dewan wajib ke



Wakil Ketua DPR RI Taufik Kurniawan berfoto bersama siswa-siswi SD Cikal Jakarta Selatan

daerah pemilihannya, untuk terjun langsung ke masyarakat, dan mencari aspirasi.

"Anggota Dewan turun ke dapil, dan bertemu langsung dengan masyarakat, untuk mencari hal-hal apa saja yang sedang terjadi atau dikeluhkan masyarakat. Aspirasi itu kemudian dirapatkan di DPR RI, untuk dibahas lebih lanjut. Imbuh politisi asal dapil Jawa Timur itu.

Perwakilan Guru Kelas 4 SD Cikal, Ardiansyah mengatakan bahwa tujuan kunjungan ini adalah untuk mendapatkan pembelajaran dari mata pelajaran "How we

organize ourself". Siswa diajak berkunjung ke Kementerian maupun Lembaga Negara.

"Mereka sebelumnya telah belajar struktur dari organisasi terkecil, seperti RT/RW ataupun Kelurahan. Kami berharap mendapatkan informasi tentang berbagai hal tentang DPR RI," harap Ardiansyah.

Acara berlangsung dengan meriah. Karena hampir seluruh siswa antusias untuk bertanya. Sebelum pertemuan, siswa diajak ke Museum dan Ruang Paripurna DPR RI. Acara diakhiri dengan pemberian cenderamata dan foto bersama. ■

Isi: PW/ Foto: Naurejo/ Idr

## DPR RI Dukung Indonesia Perkuat Hubungan dengan Iran

Dewan Perwakilan Rakyat RI mendukung Indonesia untuk memperkuat hubungan dengan Negara Republik Islam Iran. Presiden RI, Joko Widodo pun telah berkunjung ke Iran, Desember lalu. DPR RI pun sudah membentuk Grup Kerja Sama Bilateral (GKSB) dengan Parlemen Iran.

Demikian diungkapkan Wakil Ketua DPR RI bidang Korinbang, Agus Hermanto saat menerima Perwakilan Parlemen Negara Republik Islam Iran, Mr. Nourian dan Mr. Rezaei, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (02/02). Dalam kesempatan ini, hadir juga Wakil Ketua BKSAP DPR RI Syaifullah Tamliha (F-PPP), Ketua GKSB Indonesia Iran sekaligus Anggota BKSAP Mustofa Assegaf (F-PPP), dan Anggota Komisi VIII DPR RI Jalaludin Rakhmat (F-PDI Perjuangan). Delegasi Parlemen Iran didampingi Dubes Iran untuk Indonesia, Valiollah Mohammadi.

"Kita pun sudah melakukan berbagai

pertemuan dengan Iran, dan juga selalu melakukan pertemuan di berbagai sidang internasional. Hubungan kedua negara sangat dekat dan berkembang. DPR RI sangat mendukung hubungan dalam rangka kerjasama yang semakin baik," kata Agus.

Untuk hubungan ekonomi, jelas Agus, dilaporkan juga ekspor semakin meningkat. Hasil dari kunjungan Presiden RI beserta seluruh jajaran ke Iran, dalam waktu dekat, Iran akan mengirim minyak mentah ke Indonesia. Ada dua ladang minyak di Iran yang akan digarap oleh Pertamina untuk Indonesia.

Sementara terkait kebijakan Presiden

Amerika Serikat Donald Trump yang melarang masuknya imigran dari 7 negara Islam, dimana salah satunya Iran, Agus menegaskan bahwa sebagai negara yang memiliki penduduk muslim, Indonesia dan Iran harus saling menguatkan. Politisi F-PD itu berharap Indonesia dan Iran siap menghadapi perubahan kebijakan internasional.

"Tentunya dengan kebijakan Presiden AS itu, kita harus menguatkan ikatan dan persaudaran kita. Karena antara Iran ataupun dengan negara sahabatnya, khususnya Indonesia, yang mempunyai masyarakat muslim terbesar di dunia, harus saling menguatkan ikatan dan persatuan untuk dapat menghadapi segala sesuatunya, termasuk dengan perubahan kebijakan di internasional," jelas Agus.

Dalam kesempatan yang sama, Parlemen Iran juga mengundang DPR RI untuk berkunjung ke Iran. Saling kunjung itu dalam rangka meningkatkan hubungan kedua negara, dan persoalan di Palestina.

"Ini pun juga sudah ditindak lanjuti dengan baik. Karena kita ada GKS antara Parlemen Indonesia dengan Parlemen Iran. Saling berkunjung ini agar hubungan menjadi jauh lebih baik," harap politisi asal dapil Jawa Tengah itu.

Harapan untuk meningkatkan kerjasama antara kedua negara juga datang dari Wakil Ketua BKSAP DPR RI Syaifullah Tamliha. Politisi asal dapil Kalimantan Selatan itu berharap hubungan kerjasama ekonomi



Wakil Ketua DPR RI Bidang Korinbang, Agus Hermanto berjabat tangan dengan perwakilan Parlemen Negara Republik Islam Iran

Indonesia dengan Iran meningkat, mengingat Iran memiliki cadangan sumber daya alam dan minyak bumi yang tertinggi di dunia.

Sementara itu, Mr. Nourian mengatakan, terkait hubungan bilateral kedua negara, pihaknya meminta perluasan bidang kerjasama. Pihaknya pun berjuang untuk terus meningkatkan hubungan yang baik ini.

Ia tak menampik, saat ini Negara Islam banyak mendapat rintangan dan halangan. Namun hal ini datang bukan dari rezim kebijakan negara Barat, tapi dari negara Islam itu sendiri. "Kami yakin, untuk

menyelesaikan hal ini adalah persatuan antar negara Islam, dan solidaritas seluruh masyarakat Islam," imbuh Mr. Nourian.

Menurutnya, dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, skala dunia semakin terlihat kecil. Sehingga hubungan antar umat Muslim di seluruh semakin terjalin erat. Dalam kesempatan itu, ia juga menyampaikan salam dan undangan dari Ketua Parlemen di Konferensi di Iran pada 21 Februari untuk membahas isu Palestina.

"Kami minta dukungan terhadap masyarakat Iran yang selalu dizhalimi. Semoga dengan adanya konferensi ini, Indonesia memberi dukungan kepada Iran,"

(Grafis: Anandita)



Ketua Panja KUHP, Benny K. Harman

## Panja KUHP Bahas Pro Kontra Proses Pelaporan Dugaan Penghinaan Agama

Proses pelaporan terhadap pelaku dugaan penodaan, penistaan dan penghinaan agama menjadi pro dan kontra dalam pembahasan rapat dengar pendapat umum (RDPU) Komisi III DPR RI dengan perwakilan organisasi keagamaan.

Terkait Bab VII Tindak Pidana terhadap agama khususnya pasal 348, 349 dan 350 ada sejumlah masukan dari perwakilan organisasi agama, Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) dan

Konferensi wali gereja Indonesia. Salah satunya adalah terkait pelapor terhadap dugaan penghinaan, penistaan atau penodaan agama agar hanya boleh dilakukan oleh lembaga, bukan perorangan," ujar Ketua Panja KUHP



Benny K. Harman saat memimpin rapat di ruang rapat Komisi VIII, Gedung DPR RI, Senayan Jakarta, Senin (06/02).

Pada kesempatan itu Ketua Hukum dan HAM PHDI, Yanto Jaya menilai lembaga keagamaanlah yang dianggap paling paham ketika seseorang diduga telah melakukan tindakan penghinaan, penodaan atau penistaan terhadap agamanya sesuai dengan ajaran dan aturan dalam agama masing-masing.

"Lembaga agamalah yang paling tahu. Bukan orang per orang atau individual. Mereka bisa melaporkan ke lembaga keagamaannya

masing-masing. Nah lembaga keagamaan akan menilai, jika cukup bukti bisa melaporkan itu ke aparat penegak hukum," ungkap Yanto.

Sementara itu menurut anggota Komisi VIII Didik Mukrianto, penghormatan dan penghargaan negara terhadap hak masing-masing individu sudah diatur dalam Pasal 29 UUD 1945 dimana negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa. Negara juga menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu.

Oleh karena itu adalah hak masing-masing

## Penghormatan dan penghargaan negara terhadap hak masing-masing individu sudah diatur dalam Pasal 29 UUD 1945

individu untuk membela agama yang diakui dan dipercayainya tersebut. Sehingga hal tersebut tidak dapat diwakilkan oleh orang lain ataupun lembaga lain. ■

(Ayu, sat, Foto: Anel/itr

## Perlu Ketajaman Program Untuk Revitalisasi Madrasah

Anggota Komisi VIII DPR RI Ledia Hanifah menyuarakan kepada Kementerian Agama agar lebih bisa mengkaji secara mendalam mengenai program revitalisasi MAPK (Madrasah Aliyah Program Khusus) yang sebelumnya MA (Madrasah Aliyah) agar jelas target yang akan 'dituju'.

**D**itemui saat diskusi dengan Kepala Kantor Wilayah Kalimantan Timur bersama Tim Kunspek Komisi VIII, di Balikpapan, Kamis (02/02). Ledia meminta pemerintah harus memiliki standar minimal yang akan dicapai. Pasalnya hingga saat ini pencapai yang akan 'dikejar' tersebut belum terlihat dari rencana revitalisasi itu sendiri.

Program revitalisasi ini bukan sekedar untuk direlokasi buat operasional saja, tetapi juga harus dipikirkan selanjutnya sesudah menjadi MAPK akan seperti apa. Hal ini karena animo masyarakat Balikpapan yang sangat tinggi, jadi diperlukan kajian yang lebih mendalam. "Kita lihat ternyata belum sepenuhnya siap dan ada analisa yang kurang tajam, Kementerian Agama mesti kita dorong karena ketika melakukan perubahan harusnya dipikirkan sejak awal dan dianalisis secara tajam," cetusnya.

Beberapa hal yang perlu ditingkatkan ialah SDM tenaga pengajar, sarana dan prasarana pendukung yang memadai, memiliki standarisasi yang baku serta dilengkapi dengan petunjuk pelaksana yang jelas. Penyelenggaraan MAPK melalui SK Menteri Agama jangaan lagi hanya bersifat susulan dan pelaksanaannya dititipkan dan



Anggota Komisi VIII DPR RI Ledia Hanifah berdialog dengan jajaran Tim Kanwil Kemenag Prov.Kaltim

menginduk ke sekolah tersebut.

Di sisi lain Ledia juga mengapresiasi progress Madrasah adanya kerjasama dengan IAIN (Institute Agama Islam Negeri) Samarinda terkait tenaga pengajar dan tenaga mentor, "Kalau bisa ditekankan lagi dengan IAIN siswa tersebut diajak PKL itu kan jauh lebih baik karena ada pendampingnya," terangnya.

Dengan adanya MAPK ia berharap lulusannya akan lebih produktif. " Kita berharap lulusan ini tidak hanya bisa mengambil S1 dalam negeri, bukan tidak

mungkin mereka diterima di universitas luar negeri seperti di Al-Azhar Mesir. Itu yang mesti dipersiapkan sebab mereka punya kesempatan yang lebih jauh lagi," tutur Ledia.

Dalam kunspek yang dipimpin Sodik Mudjahid (F-Gerindra) ikut serta anggota Iskan Qolba (F-PKS), Hamka Haq (F-PDIP), Rahayu Saraswati (F-Gerindra), Kuswiyono (F-PAN), Maman Imanul (F-PKB), Ledia Hanifah (F-PKS), Achmad Mustakim (F-PPP), Choirul Muna (F-NASDEM) dan Arif Suditomo (F-Hanura). ■

(@gmp), Foto: Jayadhr

## Komisi VIII DPR RI Dorong Anggaran Rehab Rekon Pasca Bencana Ternate

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Deding Ishak mengatakan, akan mendorong anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana letusan Gunung Gamalama dalam APBN 2017, sesuai dengan proposal yang diajukan Pemerintah Kota Ternate.

“ Saat rapat dengan Pemkot Ternate, saya langsung menelpon Deputi BNPB Pusat, Alhamdulillah langsung direspon, Insya Allah pada APBN 2017 nanti akan dianggarkan untuk Rehab-Rekon,” kata Politisi F-Golkar itu saat memimpin Kunspek Komisi VIII DPR RI, Ternate, Maluku Utara, Kamis (02/02).

Deding menjelaskan, ada beberapa prioritas Rehab-Rekon yang dibutuhkan Kota Ternate saat ini. Pertama, berkaitan dengan abrasi disekitar pantai, perlu dibangun tanggul agar air tidak naik.

Selanjutnya kata Deding, saat meninjau sungai Togorara, tanggul bangunan yang dilewati lahar dingin juga perlu perbaikan. Dan perlu adanya relokasi perumahan warga dipinggir sungai karena masuk ke dalam rawan bencana. Belum lagi minimnya peralatan untuk penanganan bencana.

Terkait informasi logistik sistem manajemen kebencanaan, Deding menekankan harus ada peta rawan bencana dari Kab.Kota maupun Provinsi. Sehingga, masyarakat bisa mengenali secara jelas terkait dengan potensi bencana yang ada didaerah itu.

“Seperti di Jepang, ada sistem dan kesadaran secara detail untuk menghadapi

bencana. Kita berharap nanti ada program dari pusat untuk pelatihan tanggap bencana, yang diikuti masyarakat maupun aparat pemerintah,” ujar Politisi Dapil Jabar III itu.

Sementara itu, Walikota Ternate, Burhan Abdurahman mengatakan, untuk rehab-rekon pasca bencana meletusnya Gunung Gamalama menjadi prioritas. Mengingat gunung itu yang paling sering meletus.

Menurut Burhan, di Ternate ada beberapa aliran sungai yang selalu dialiri air hujan maupun lahar. Dan di sepanjang aliran sungai tersebut terdapat perumahan warga. “Yang menjadi kekhawatiran kami, kalau ada hujan lebat, masyarakat di sepanjang aliran sungai harus mengungsi, bahkan pernah ada korban jiwa,” terangnya.

Burhan mengakui, bahwa, Pemkot sangat terbatas biaya untuk membangun tanggul atau bendungan. Pihaknya telah mengusulkan kepada BNPB tahun 2015 tapi belum terealisasi sampai saat ini.

Untuk itu, kata Burhan, dalam proposal yang diberikan, sudah tercantum pembangunan tanggul pengendali banjir lahar dingin sungai Togogara dan sungai Pilatoe. “Tanggul yang ada saat ini, beberapa dijebol warga sekitar kali dengan alasan untuk perluasan kawasan pemukiman. Sedangkan sungai Pilatoe pernah dibangun dengan dana APBN, namun panjangnya tidak mencukupi,” tutupnya. ■

©-mpf, Foto: Jember

Tim Kunspek Komisi VIII DPR RI meninjau tanggul bangunan Sungai Togorara yang dilewati lahar dingin





# Panja Kesra Prajurit Kunjungi Rumkital Koartim, Jatim

Profesionalisme TNI belum dibarengi dengan tingkat kesejahteraan yang memadai. Kesejahteraan prajurit saat ini belum sesuai dengan standar minimum kebutuhan dasar yang layak mencakup sandang, pangan, papan, kebutuhan keluarga seperti pendidikan anak dan jaminan hari tua.

**H**al itu diungkapkan Ketua Komisi I Abdul Kharis Almasyhari (F-PKS) saat pertemuan Tim Panja (Panitia Kerja) Kesejahteraan Prajurit TNI Komisi I dengan Panglima Komando Armada RI Kawasan Timur (Pangarmat) Laksamana Muda TNI Darwanto, di ruang rapat Diskes Koarmatim, Ujung Surabaya, Kamis (02/02).

Terkait pengendalian mutu dan pelayanan Rumkit TNI, lanjut dia, tidak hanya dituntut untuk memberikan pelayanan kesehatan bagi anggota TNI, keluarga dan para PNS di lingkungan Kemhan/TNI tetapi juga kepada masyarakat umum. Karena itu, mutu dan pelayanan yang diberikan harus dijaga dan ditingkatkan. Terutama, dengan semakin meningkatnya pendidikan dan sosial ekonomi masyarakat. Maka sistem nilai dan orientasi dalam masyarakatpun mulai berubah.

Selain itu, kata Abdul Kharis, Rumkit TNI dituntut untuk mampu memberikan pelayanan yang lebih baik, ramah dan bermutu. Makanya, fungsi Rumkit TNI sebagai pemberi pelayanan kesehatan secara bertahap terus ditingkatkan agar menjadi efektif dan efisien serta memberi kepuasan terhadap pasien, keluarga dan masyarakat. "Berdasarkan hal itu, maka peningkatan mutu pelayanan kesehatan Rumkit TNI mutlak dilakukan," ungkap politisi PKS ini.

Menurutnya, Panja Kesejahteraan Prajurit TNI Komisi I DPR RI melaksanakan kunjungan ini dimaksudkan untuk mendapatkan masukan terhadap Kesejahteraan Prajurit TNI AL yang bertugas di Koarmatim, serta



Tim Panja Kesra Prajurit Komisi I DPR RI foto bersama Panglima Koartim di diskas Koarmatim Ujung, Surabaya

pelayanan Rumkital dr. Idris P Siregar dalam beroperasi. Harapannya, agar kesehatan prajurit dapat ditingkatkan maka kesejahteraan bukan hanya dari uang lauk-pauk tetapi juga jaminan kesehatan melalui rumah sakit TNI yang tersebar di seluruh Indonesia. Sehingga kualitas dan kuantitas kesejahteraan dapat dirasakan prajurit beserta keluarga.

Sementara itu, Panglima Komando Armada RI Kawasan Timur (Pangarmatim) Laksamana Muda TNI Darwanto dalam sambutannya mengucapkan selamat datang dan terima kasih kepada Tim Panja Kesejahteraan Prajurit TNI Komisi I atas kedatangan di Mako Koarmatim dalam rangka untuk mengetahui upaya rumah sakit TNI dalam meningkatkan pengelolaan keuangan, pengendalian mutu dan standar pelayanan serta sarana/prasarana.

Pangarmatim mengatakan, Rumkital dr. Idris P Siregar sebagai salah satu fasilitas kesehatan Diskes Koarmatim, terus memberikan pelayanan terbaik untuk prajurit melalui uji pemeriksaan kesehatan yang rutin dilaksanakan, dan memanfaatkan waktu olahraga secara maksimal sehingga kesehatan prajurit tetap terpelihara.

Disamping itu, lanjut Pangarmatim, Koarmatim secara kontinyu melaksanakan

**Fungsi Rumkit TNI sebagai pemberi pelayanan kesehatan secara bertahap terus ditingkatkan agar menjadi efektif dan efisien serta memberi kepuasan terhadap pasien, keluarga dan masyarakat.**

bakti sosial pelayanan kesehatan dan donor darah bekerjasama dengan Pemerintah Daerah, PMI, Organisasi Kemasyarakatan dan pihak swasta.

Kepala Sub Dinas Kesehatan Umum (Kasubdis Kesum) Diskes Koarmatim Mayor Laut (K) dr. M Solikhin menyampaikan paparan tentang penyelenggaraan dukungan kesehatan dan pelayanan kesehatan untuk rawat jalan dan rawat inap. Tugas dan fungsi Rumkit saat ini mengacu pada standar rumah sakit tingkat IV (PPK 1). ■

(w). Foto: iwantri

# Komisi V DPR RI Siap Bantu Persoalan Infrastruktur Pegunungan Arfak

Kehadiran DPR RI dalam hal ini Komisi V DPR RI ke Provinsi Papua Barat, tepatnya di Kabupaten Pegunungan Arfak diharapkan bisa membantu persoalan kondisi infrastruktur dan transportasi yang menjadi kebutuhan masyarakat setempat.

“Tadi Bupati Pegunungan Arfak mengharapkan bahwa dengan hadirnya Komisi V DPR RI yang melihat secara langsung kondisi infrastruktur dan transportasi yang begitu sulit dari Manokwari sampai ke Pegunungan Arfak, ada rasa keterpanggilan untuk membantu melalui Anggaran Pendapatan Belanja Negara, khususnya ke Pegunungan Arfak,” kata Wakil Ketua Komisi V DPR RI Michael Wattimena usai pertemuan dengan Bupati Pegunungan Arfak Yosias Saroy beserta jajaran SKPD lainnya, di Pegunungan Arfak, Kamis (02/02).

Menurut Michael Wattimena yang juga politisi Partai Demokrat itu, dari 13 kabupaten/kota yang ada di Papua Barat, tingkat kesulitan yang paling masif itu ada di Kabupaten Pegunungan Arfak.

“Sehingga kehadiran kami 10 Anggota DPR RI dari Komisi V, setelah nanti kembali dalam RDP maupun Raker dengan pemerintah pusat dapat memberikan pertimbangan-pertimbangan ke depan supaya pembangunan infrastruktur dan transportasi ini bisa dapat dibantu,” katanya.

Terkait penjelasan Bupati Yosias Saroy yang menyatakan Perpres No 131 Tahun 2015 tentang cluster kabupaten tertinggal dimana dalam Perpres itu ada 122 kabupaten tertinggal namun tidak ada Kabupaten Pegunungan Arfak, Michael Wattimena menilai karena Pegunungan Arfak merupakan daerah otonomi baru sehingga belum masuk dalam cluster kabupaten tertinggal.

“Sudah ada surat daripada Kementerian Bappenas. Ini hanya soal faktor koordinasi saja. Harapan kami ke depan bahwa nanti dalam rapat dengan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi yang merupakan mitra kerja kami di Komisi V DPR RI, ini dapat didiskusikan, dan kebetulan informasi ini baru kami dapatkan hari ini,” ujarnya.

Menyangkut masih kurang banyaknya gedung pemerintahan di Kabupaten Arfak, Michael Wattimena mengatakan kewenangan itu ada di Komisi II DPR RI. Pihaknya juga akan mengkomunikasikan persoalan ini dengan Komisi II DPR RI.

“Harapan kami, proaktif dan intensitas komunikasi yang terbangun antara pemerintah kabupaten dan pemerintah provinsi dengan pemerintah

pusat ini harus dibangun sebuah sinergitas positif. Sehingga apa yang menjadi kebutuhan dari daerah tingkat dua itu bisa dapat terfasilitasi dengan baik,” katanya.

Kunjungan kerja Komisi V DPR RI ke Provinsi Papua Barat yang dipimpin Wakil Ketua Komisi V DPR RI Michael Wattimena itu juga diikuti sejumlah anggota Komisi V



Tim Kunspek Komisi V DPR RI meninjau infrastruktur dan transportasi di Kabupaten Pegunungan Arfak, Papua Barat

DPR RI diantaranya, Sadarestuwati (PDIP), Capt Anthon Sihombing (Partai Golkar), Daniel Mutaqien Syafiudin (Partai Golkar), Subarna (Gerindra), Willem Wandik (Partai Demokrat), Anton Sukartono Suratno (Partai Demokrat), Sahat Silaban (Partai Nasdem), Capt Djoni Rolindrawan (Partai Hanura), dan Sungkono (PAN). ■

PH/Foto: Nibahr

## Karo Pemberitaan Parlemen Terima Guru PPKN Tangsel

Kepala Biro Pemberitaan Parlemen Setjen DPR RI-RI menerima perwakilan guru-guru tingkat Sekolah Menengah Atas yang tergabung dalam Musyawarah Guru Mata Pelajaran PPKN (Pendidikan dan Pancasila dan Kewarganegaraan) se Tangerang Selatan di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Selasa (07/02).

**K**unjungan 24 guru tingkat SMA baik dari Swasta maupun Negeri ini untuk menggali informasi lebih mendalam tentang peran dan fungsi DPR sehingga bisa ditransfer ke peserta didik atau murid.

Dalam pertemuan tersebut, Kepala Biro Pemberitaan Parlemen Djaka Dwi

Winarko yang didampingi Kepala Bagian Humas Dadang Prayitna menjabarkan berbagai hal yang berkaitan dengan tugas DPR khususnya di era reformasi. Selain tiga tugas pokok bidang legislasi, penyusunan anggaran dan pengawasan, kini ditambah dengan peran diplomasi dan representasi.

Dia juga menceritakan sejarah perjalanan



# Badan Keahlian Dewan Terima DPRD Tasikmalaya

Kepala Badan Keahlian DPR RI Johnson radjaguguk menerima kunjungan Anggota DPRD Kabupaten Tasikmalaya, yang hendak melakukan konsultasi terkait dengan masalah mekanisme reses serta output reses yang dikaitkan dengan pokok-pokok pikiran DPRD.

**K**edatangan Anggota DPRD Kabupaten Tasikmalaya untuk mendapatkan referensi tentang beberapa hal yang berkaitan dengan jalannya kegiatan di DPRD Kabupaten Tasikmalaya, terutama mengenai kegiatan yang hingga kini belum dilaksanakan secara baku yaitu tentang pelaksanaan reses yang tingkat output hasil reses tersebut akan dikemudian arahnya menjadi bagian dari produk hukum di daerah.

"Salah satu hal penting selain pada masa persidangan adalah kegiatan pada masa reses. Kunjungan Anggota Dewan ke daerah pemilihan merupakan bagian dari fungsi pengawasan yang dilakukan oleh Komisi-komisi secara kelembagaan, dan juga dalam hal menyerap aspirasi," jelas Johnson di



Kepala BKD DPR RI Johnson Radjaguguk dan Anggota DPRD Kabupaten Tasikmalaya

Gedung Setjen dan BKD DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (06/02).

Johnson mengatakan, itu sebagai salah satu hal penting, dimana para anggota Dewan memperjuangkan kebutuhan-kebutuhan yang ada pada daerah pemilihannya. Semakin kuat relasi antara anggota dengan dapil, maka akan berimplikasi terhadap perjuangan dari dapil itu sendiri.

" Yang kita sampaikan sebagai Badan Keahlian Dewan adalah dari sisi mekanismenya, agar semua output atau hasil dari reses itu bisa menjadi salah satu dokumen yang disampaikan dan masuk dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Kami memberikan masukan-masukan, tetapi tidak langsung berkaitan dengan reses, karena kegiatan reses itu merupakan kegiatan Komisi dan Anggota Dewan. Yang kita berikan dukungan tersebut adalah semata-mata yang berkaitan dengan legislasi," ucapnya.

Kalau dilihat berdasarkan peraturan perundang-undangan dan perjuangan dapil, lanjut Johnson, maka DPR RI telah menetapkan peraturan DPR RI tentang perjuangan daerah pemilihan dari masing-masing anggota, dan pengaturan tentang mekanismenya. Meskipun hal itu masih diupayakan mengenai sistemnya. ■

(Bepmp) Foto : Kresnohtr

terjadi dalam suatu pembahasan hingga menjadi kebijakan nasional. Menurutnya, tugas seorang anggota parlemen adalah bicara sehingga wajar jika terlihat gaduh sebagai ekspresi DPR dalam menjalankan fungsi pengawasannya terhadap kebijakan pemerintah.

"Di DPR RI lah diperdebatkan ide-ide atau gagasan tentang bagaimana untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, bagaimana mengelola negara dengan baik," tandas Djaka.

Di sisi lain, ia juga tak menampik jika ada wakil rakyat yang tersandung kasus hukum. Menurutnya, justru disinilah peran masyarakat madani untuk mengontrol jalannya kekuasaan sehingga amanah yang diemban dapat berjalan dengan baik.

"Proses demokrasi saat ini masih banyak yang perlu kita benahi, mari kita bersama-sama sebagai warga negara kritis, paling

tidak ketika memilih wakilnya," imbuhnya.

Forum diskusi berlangsung interaktif, terlihat dari pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dari para guru yang hadir. Koordinator MGMP PPKN Dedy Sutendi dari SMA GIS Serpong mengatakan forum ini sangat bermanfaat untuk menambah pengetahuan para guru agar bisa di transfer kepada siswa-siswanya.

Menurutnya, siswa setingkat SMA saat ini sudah lebih peduli terhadap perpolitikan di tanah air sehingga diharapkan calon generasi penerus bangsa ini tidak alergi terhadap politik dan ideologi bangsa.

"Interest mereka lebih tinggi karena sekarang sudah ada sosial media. Para siswa jadi lebih aktif mengikuti perkembangan isu politik, bahkan bisa dikatakan yang ramai di media, 90 persen ada kaitannya dengan PPKN," pungkas Dedy. ■

(Bepmp) Foto : Jiwadhr



Suasana pertemuan Kepala Biro Pemberitaan Parlemen Setjen DPR RI menerima perwakilan guru-guru tingkat SMA

demokrasi di Indonesia, mekanisme pembuatan Undang-Undang (UU) mulai dari persiapan naskah akademik hingga ditetapkan dalam Prolegnas sebagai dasar pembahasan dengan Pemerintah.

Lebih lanjut, ia menjabarkan hak-hak Anggota DPR RI hingga dinamika politik yang

## Lasarus : Kendala Teknis Hambat Pembangunan Bandara Buntu Kunyi

Pembangunan Bandara Buntu Kunyi (BBK), Tana Toraja, terhenti akibat masih adanya berbagai kendala teknis yang belum terselesaikan. Hal ini diungkapkan Lasarus selaku Ketua Tim Kunjungan Spesifik Komisi V DPR RI didampingi beberapa anggota Komisi V DPR RI saat meninjau lokasi pembangunan bandara tersebut di Kecamatan Mengkendek, Tana Toraja, Kamis (02/02) siang.



Tim Kunspek Komisi V DPR RI meninjau lokasi pembangunan bandara di Kec. Mengkendek, Tana Toraja

“Dua bukit yang mengapit menjadi persoalan yang harus dikaji ulang oleh Kementerian Perhubungan, apakah cukup aman untuk keselamatan penerbangan. Selain itu, perlu perhitungan ulang anggaran yang dibutuhkan sesuai dengan kondisi serta medan yang dihadapi,” kata Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus, kepada awak media di lokasi Bandara Buntu Kunyi.

Pada studi awal yang dibuat Tim dari Institut Teknologi Bandung (ITB) sebelum proyek ini dilaksanakan, estimasi biaya yang dibutuhkan senilai Rp 500 miliar. Bahkan Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla dalam kunjungannya beberapa waktu lalu, telah memerintahkan Departemen Perhubungan

menyelesaikan persoalan teknis di Bandara Buntu Kunyi ini.

"Secara politik anggaran, Komisi V DPR RI akan mendukung penuh kelanjutan pembangunan Bandara Buntu Kunyi, karena berdasarkan informasi Dirjen Perhubungan, dari semua wilayah di Tana Toraja yang paling memungkinkan hanya di sini," imbuh Lasarus.

Sementara Dirjen Perhubungan Udara Departemen Perhubungan, Suprasetyo, yang mendampingi Komisi V DPR RI, mengatakan hingga kini pihaknya masih melakukan kajian mendalam terkait BBK.

Kajian yang dimaksud adanya persoalan teknis yang meliputi pembiayaan dan struktur tanah. Selain itu, kata Suprasetyo,

persoalan keselamatan penerbangan juga akan dikaji lebih mendalam.

"Kajian studi ini selama tiga bulan. Studinya selesai, baru kita akan tahu jenis pesawat apa yang memungkinkan bisa terbang di sini," jelasnya.

Dalam kunjungan tersebut, para legislator Senayan ini didampingi Bupati Tana Toraja, Nicodemus Biringkanae dan Bupati Toraja Utara, Kalatiku Paembonan serta jajaran SKPD. Tim Kunspek Komisi V DPR RI yaitu Lasarus (Ketua Tim/Wakil Ketua Komisi V DPR RI), Hamka B. Kady, Andi Iwan Darmawan Aras, Bahrum Daido, Umar Arsal, Hanna Gayatri, Mahfudz Abdurrahman, Nurhayati, Fatmawati dan Miryam S Haryani. ■

(9). Foto: Nardung/tnr



Tim Kunspek Panja Kesejahteraan Prajurit TNI berdialog dengan pasien saat meninjau RS TNI AD di Kaltim

## Komisi I DPR RI Minta Rumah Sakit Dr. Hardjanto Tingkatkan Mutu Pelayanan

Ketua Tim Kunjungan Spesifik Panja Kesejahteraan Prajurit TNI, Wakil Ketua Komisi I DPR RI Asril Hamzah Tanjung minta Rumah Sakit (RS) TNI AD Dr. R. Hardjanto di Kalimantan Timur meningkatkan mutu, standar pelayanan, serta sarana dan prasarana. RS Dr. R. Hardjanto adalah rumah sakit TNI AD di Kalimantan Timur.



“ Rumah sakit ini rujukan pelayanan kesehatan bagi masyarakat di perbatasan dan ini bagian dari pengabdian TNI kepada negara dan masyarakat, harus menjadi prioritas dalam peningkatan pelayanan mutu dan standar pelayanannya,” kata Asril saat meninjau RS Dr. R. Hardjanto di Kota Balikpapan didampingi Tim Komisi I, Pangdam VI/Mulawarman Johnny Luban Tobing dan Kepala RS TNI AD Dr. R. Hardjanto Azhari Ramdani, Kamis (02/02).

Selain memberikan pelayanan kesehatan yang ditujukan kepada prajurit dan keluarganya, RS Dr. Hardjanto juga memberikan dukungan kesehatan pada prajurit dalam pelaksanaan operasi tempur maupun latihan, juga memberikan pelayanan kesehatan pada masyarakat umum.

Menurut politisi Partai Gerindra ini, anggaran pelayanan kesehatan pada Kementerian Pertahanan RI sebesar Rp750 milyar dan RS. Dr. R. Hardjanto harus menjadi prioritas. Untuk itu, Komisi I akan membicarakan hal ini dengan Menteri Pertahanan dan Panglima TNI.

"Panja ini akan mendesak Kemenhan agar Rumah Sakit Hardjanto dan rumah sakit lainnya yang telah di kunjungi Komisi I untuk diprioritaskan mendapat anggaran peningkatan standar mutu serta sarana dan prasarana," tegasnya.

Kepala RS Dr. R. Hardjanto Balikpapan Dr. Kol. Azhari Ramdani menjelaskan yang menjadi kendala rumah sakit ini adalah bangunan sebagian besar masih bangunan lama, pengelolaan limbah belum maksimal, penyesuaian pola keuangan PNBK, personel masih kurang, alat kesehatan (Alkes) masih kurang, serta pelayanan kesehatan tertentu Non BPJS belum ada alokasi belanja modal.

Menurut Azhari, kebutuhan Alkes antara lain CT Scanner, MRI, Ventilator, Mobile Rontgen, C-ARM, Atroskopy, THT Unit, Endoscopy, Desa TENS, dan Diatermi. "Ini gambaran kondisi Rumah Sakit Dr. R. Hardjanto, sebagai masukan bagi Tim Komisi I DPR RI dalam mengadakan evaluasi bagi peningkatan kinerja rumah sakit ini," katanya. ■

(rekl. Foto: Agenghr)

## Banyak Sarpras Pendidikan Dasar dan Menengah Tak Memadai

Tim Panja Sarana-Prasarana Komisi X DPR RI dipimpin Wakil Ketua Komisi Abdul Fikri Faqih bersama 13 orang Anggota Dewan, meninjau Sekolah Dasar Negeri 1 Petuk Katimpun yang berada di wilayah pinggiran Kota Palangka Raya. Jum'at (03/02). Mereka diterima Nurul Edy Kepala Dinas Prov. Kalteng dan Sahdin Hasan Kepala Dinas Pendidikan Kota Palangka Raya.

Tim Kunjungan Kerja Panja Sarana dan Prasarana Pendidikan Dasar dan Menengah Komisi X DPR RI juga berkesempatan meninjau sejumlah fasilitas sarana dan prasarana ke SMPN 11, SMAN 6 dan SMKN 5 serta berinteraksi langsung dengan guru guru dan siswa-siswi yang ada di empat sekolah tersebut.

Ketua Tim Panja Abdul Fikri mengatakan, kunjungan timnya ke sekolah-sekolah untuk melihat langsung keadaan sekolah yang ada di Provinsi Kalimantan Tengah. "Ini untuk

Sementara itu anggota Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang juga putera daerah Kalteng Asdy Narang mengatakan, tujuan dari kunjungan panja ini merupakan inisiatifnya. "Kami dari Panja Sarpras ingin melihat langsung kondisi SDN 1 Petuk Katimpun Kelurahan Petuk Katimpun Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya ini cukup baik. Namun ada beberapa ruang kelas yang perlu mendapat perbaikan dimana halaman sekolahnya terendam banjir. Kondisi seperti ini tidak hanya terjadi disini tetapi juga di daerah-daerah lainnya.

Lebih lanjut Asdy mengatakan, kunjungan Panja ini menjadi temuan dan catatan untuk dibahas di Komisi, yang selanjutnya menjadi bahan untuk dibawa ke Pemerintah Pusat. "Agar Kementerian jangan menyamaratakan standar bantuan yang akan diberikan kepada sekolah yang ada di Indonesia", tegas Asdy.

Kepada Tim Panja Sarpras Komisi X RI, Kepala



Tim Kunspek Komisi X DPR RI mengunjungi SDN 1 Petuk Katimpun di Palangka Raya

memastikan, karena di Indonesia dari ribuan bangunan sekolah masih banyak sarana dan prasarannya tidak memadai," tegasnya.

Politisi PKS ini mengatakan, pihaknya ingin melihat langsung kondisi sekolah yang ada, terutama di SDN 1 kondisinya sangat baik, tetapi yang katanya baik itu kondisi atasnya dan ternyata halamannya semua tergenang air. "Ini akan menjadi temuan dan catatan Panja Komisi X DPR RI," jelas Fikri.

SDN 1 Petuk Katimpun Panca mengharapkan perhatiannya untuk membantu sejumlah sarana dan prasarana yang sangat dibutuhkan oleh sekolah ini. "Kami mengusulkan juga kepada tim panja untuk merehap jembatan dari jalan umum ke lingkungan sekolah, karena kondisinya saat ini sudah rusak dan lapuk serta rentan terhadap ancaman banjir," imbuh Panca. ■

(rekl. Foto: Eheny)

## RS Baiturrahim Jambi Siap Layani Anggota DPR RI

Rumah Sakit (RS) Baiturrahim, Jambi, siap memberi layanan kesehatan VVIP bagi para Anggota DPR RI beserta keluarga. Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI telah meninjau kesiapan RS ini sekaligus melihat dari dekat fasilitas yang tersedia.



Tim Kunker BURT DPR RI berbincang dengan pasien saat meninjau RS Baiturrahim Jambi

para anggota BURT.

Dirut RS Baiturrahim Dodi Alamsyah Siregar menjelaskan, RS ini beroperasi sejak tahun 2012 dengan tipe C. Bagi Anggota DPR RI yang ingin berobat di RS ini cukup menyebut nama lengkapnya saja, karena 560 nama anggota sudah masuk database RS.

Usai pertemuan, Elva mengatakan, sebagai RS tipe C tentu peralatan di RS ini belum selengkap tipe B dan A. RS Baiturrahim perlu meningkatkan kelengkapan alat kesehatannya, apalagi yang akan dilayani adalah para Anggota DPR RI.

Anggota F-PDI Perjuangan ini juga mengapresiasi PT. Jasindo sebagai penyedia layanan asuransi kesehatan bagi para Anggota DPR RI. Koordinasi Jasindo dengan berbagai RS provider di seluruh Indonesia cukup baik. BURT sendiri, harap Elva, ingin agar layanan kesehatan bagi Anggota DPR RI terus ditingkatkan. ■

fmh, Foto: Huseinir

**W**akil Ketua BURT Elva Hartati yang memimpin delegasi BURT ke RS Baiturrahim, Jumat (02/02), dalam sambutannya

mengatakan, ini adalah kunjungan pengawasan untuk mengetahui sejauh mana layanan VVIP diberikan. Laboratorium dan berbagai kendala layanan juga ditanyakan

## Komisi II DPR RI Minta Kementerian PAN RB Segera Terbitkan PP ASN

Komisi II DPR RI meminta Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (PAN-RB) untuk segera menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) terkait dengan UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN). Mengingat hingga kini PP tersebut belum diterbitkan, sehingga implementasi yang tertuang dalam UU ASN belum berjalan.

**D**emikian disampaikan Ketua Komisi II DPR RI Zainudin Amali usai rapat kerja dengan Menteri PAN-RB, Dirjen Otda Kemendagri, Kepala Badan Kepegawaian Negara dan Komisi Aparatur Sipil Negara Kamis (02/02) di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta.

"Komisi II DPR RI meminta Kementerian PAN-RB untuk mempercepat terbitkan PP yang terkait dengan UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara sebelum melakukan revisi terhadap UU No 5 tahun 2014 tersebut," tegasnya.

Politisi Golkar ini juga mendorong kepada Pemerintah untuk segera melakukan penataan organisasi yang mencerminkan prinsip "tepat struktur, tepat fungsi" sehingga dapat mewujudkan birokrasi yang bersih, transparan



Ketua Komisi II DPR RI, Zainudin Amali

dan profesional.

"Komisi II DPR RI mendorong Kementerian PAN-RB, Kemendagri dan BKN untuk melakukan langkah-langkah dalam rangka mempercepat upaya penyelesaian penataan organisasi perangkat daerah termasuk dalam hal pengisian formasi jabatan yang mencerminkan prinsip tepat struktur tepat fungsi," tuturnya.

Selain itu, Komisi II DPR RI juga mendorong Kementerian PAN-RB, Kemendagri, BKN dan KASN untuk melakukan langkah-langkah dalam rangka memastikan setiap tahapan proses pengisian jabatan dengan mendasarkan pada merit sistem dalam suatu sistem rekrutmen yang terbuka dan berbudaya pencapaian kinerja.

Terkait dengan simpang siur informasi mengenai pengangkatan tenaga honorer, Komisi II DPR RI juga meminta kepada Kementerian PAN-RB untuk segera memberikan penjelasan secara resmi. "Komisi II DPR RI juga meminta kepada Kementerian PAN-RB untuk segera memberikan penjelasan secara resmi terkait kelanjutan penanganan dan penyelesaian tenaga honorer K1 dan K2," tutur Amali.

Komisi II DPR RI memberikan apresiasi kepada KASN atas upaya yang telah dilakukan dan meminta KASN untuk terus meningkatkan kinerja dan meningkatkan perannya dalam melakukan pengawasan terhadap kebijakan dan peraturan yang berkaitan dengan masalah kepegawaian nasional.

"Kami juga memberikan apresiasi kepada KASN atas upaya yang telah dilakukan dan meminta KASN untuk meningkatkan perannya dalam melakukan pengawasan terhadap masalah kepegawaian nasional," tutup Amali. ■

(rel) Foto: Jayadhr

## Mendag Diminta Stabilkan Harga Bahan Pokok dan Penting

Rapat Kerja Komisi VI DPR RI dengan Kementerian Perdagangan RI menyepakati agar Mendag RI menetapkan kebijakan pasokan dan stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting, rapat diselenggarakan di ruang sidang komisi, Nusantara I, Senin, (06/02). Rapat dipimpin Ketua Komisi VI DPR RI, Teguh Juwarno dihadiri Mendag Enggartiasto Lukita.



Ketua Komisi VI DPR RI, Teguh Juwarno

“Komisi VI DPR RI meminta agar Menteri Perdagangan RI menetapkan kebijakan pasokan dan stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting terutama terhadap pengendalian harga 11 komoditas bahan kebutuhan pokok,” papar Teguh membacakan kesimpulan rapat.

Kebijakan stabilitas harga barang kebutuhan pokok dimaksudkan untuk menjaga keterjangkauan harga di tingkat konsumen dan melindungi pendapatan produsen, sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. Komisi VI juga meminta Kemendag

agar tetap menjaga kinerja di tahun 2017 dengan melakukan upaya optimalisasi melalui efisiensi dan efektifitas pelaksanaan program, termasuk 10 program prioritas dalam Pagu Anggaran Kementerian Perdagangan TA. 2017 sebesar Rp3,440 Triliun.

Selain itu dalam rapat juga diungkapkan, bahwa Komisi VI DPR RI mengapresiasi realisasi anggaran Kemendag Tahun 2016 sampai dengan tanggal 31 Desember 2016 sebesar Rp3,525 Triliun atau 96,08% dari total pagu Rp3, 669 Triliun termasuk self blocking Rp723,235.Miliar. ■

(eko.mpi) Foto: Rian/hr

# Komisi V DPR RI Harap Pembangunan Jalan Tol Semarang Demak Terealisasi

Komisi V DPR RI berharap pembangunan jalan tol Semarang-Demak segera terealisasi. Pasalnya, pembangunan jalan tol ini juga berfungsi sebagai tanggul pantai untuk menyelesaikan persoalan abrasi pantai. Hal tersebut diungkapkan Wakil Ketua Komisi V DPR RI Yudi Widiana Adia saat melakukan peninjauan abrasi pantai di Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengah, Kamis (02/02).



Tim Kunspek Komisi V DPR RI meninjau lokasi pembangunan jalan tol Semarang-Demak di Jateng

Pembangunan jalan tol Semarang-Demak yang multi fungsi menjadi tanggul pantai bagi wilayah sekitar dirasa cukup terlambat. Mengingat sejak sekitar tahun 1990 masyarakat sekitar sudah terendam air rob, dan baru dilakukan

pemindahan pemukiman pada tahun 2001," kata Yudi.

Meskipun dirasa cukup terlambat, ia berharap pihak Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat juga kementerian terkait lainnya dapat segera membuat desain

perencanaan yang terpadu dan dapat bersinergi secara komprehensif.

"Jangan tambal sulam. Saat ini saya melihat relatif tambal sulam ya. Program-program kabupaten, program-program provinsi yang semuanya, dengan berjalannya





Meskipun dirasa cukup terlambat, ia berharap pihak Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat juga kementerian terkait lainnya dapat segera membuat desain perencanaan yang terpadu dan dapat bersinergi secara komprehensif.

"Masyarakat yang ada di Desa Sriwulan ini jumlahnya tidak sedikit hampir 15-20 ribu. Ini perlu ada jalan keluar dan salah satu jalan keluar yang akan dipadukan dalam pemikiran kami dan Kementerian PU adalah penyelesaian di satu sisi supaya tidak terjadi rob, dan di sisi lain kemacetan yang terjadi antara jalur Semarang-Demak juga jadi bisa ditanggulangi," jelasnya.

Sehingga, lanjut Yudi, perlu dipikirkan dan bisa diimplementasikan ke depan adalah jalan tol Semarang-Demak yang mungkin menyisir daerah pesisir pantai utara antara Semarang dan Demak.

Tim Kunjungan Spesifik Komisi V DPR RI ke Kabupaten Demak dipimpin Wakil Ketua Komisi V DPR RI Yudi Widiana Adia (F-PKS), dan didampingi Anggota Komisi V DPR RI Yoseph Umarhadi (F-PDIP), Sudjadi (F-PDIP), Budi Yuwono (F-PDIP), Agati Sulie Mahyudin (F-PG), Gatot Sudjito (F-PG), Rita Zahara (F-Gerindra), Bakri (F-PAN), Fathan (F-PKB), Alamuddin Dimiyati Rois (F-PKB), Sigit Sosiantomo (F-PSK), dan Syarif Abdullah Alkadrie (F-Nasdem). ■

(real) Foto: Nidrah



waktu terendam kembali oleh air laut. Saya kira harus ada bendungan raksasa yang sekaligus merupakan jalan tol. Dan nanti air baku yang dihasilkan juga bisa dimanfaatkan masyarakat," papar politisi dari F-PKS ini.

Dalam kesempatan tersebut, Yudi

menjelaskan bahwa Kecamatan Sayung merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Demak yang setiap tahun mengalami penurunan struktur tanah sekitar 15-20%, sehingga daerah tersebut setiap harinya kerap terendam air rob.

# Kewenangan Bahas RUU Tetap di DPR RI dan Pemerintah

Meski Mahkamah Konstitusi (MK) telah memutuskan DPD RI memiliki kewenangan membahas Rancangan Undang-Undang (RUU), namun keputusan itu tetap berada di DPR RI dan Pemerintah. Kalau DPR RI kewenangan itu ada di Badan Legislasi (Baleg), dan pemerintah ada di Kemenkumham RI. Sehingga RUU yang diajukan oleh DPD RI tetap akan diputuskan oleh DPR RI dan pemerintah. Maka, perlunya memperkuat Baleg DPR RI.

“Keikutsertaan DPD RI pun hanya terkait RUU yang membahas keuangan pusat dan daerah, serta otonomi daerah. Tapi, kalau ada pembahasan revisi UU MD3, khusus terkait tambahan kursi MPR RI, DPD RI tetap ikut membahas bersama DPR RI,” tegas Ketua Baleg DPR RI Supratman Andi Atgas dalam forum legislasi “Urgensi Penguatan Baleg pada Revisi UU MD3” bersama Ketua PPUU DPD RI, Afnan Hadikusumo, dan pakar hukum tata negara Irman Putrasidin di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (07/02).

Namun demikian kata politisi Gerindra itu, pihaknya berharap revisi UU MD 3 tidak hanya berbicara tambahan kursi pimpinan MPR RI, melainkan sekarang ini kinerja legislasi sedang menurun. Hal itu dipengaruhi juga dengan tugas pengawasan di komisi-komisi DPR RI yang juga padat. “Tugas pengawasan di setiap komisi DPR RI itu mempengaruhi kinerja legislasi,” ujarnya.

Kalau sudah dibahas bersama kata Supratman, maka produknya sebisa mungkin tidak ada lagi yang digugat atau judicial review ke Mahkamah Konstitusi. “Tapi, sudah ada kemajuan hubungan antara DPR RI dan DPD RI terkait Prolegnas. Hanya butuh komunikasi yang intensif dan DPD RI harus komunikasi aktif dengan fraksi-fraksi DPR RI mengingat keputusan akhir tetap ada di fraksi DPR RI. Kalau fraksi sudah mendukung, maka anggota pasti mendukung,” tambahnya.

Seperti RUU Wawasan Nusantara yang sudah masuk prolegnas, maka pembahasannya tergantung usaha intensif DPD RI. Karena itu agar produk legislasi itu lebih baik dan berkualitas, maka Baleg harus diperkuat. “Kalau Baleg sudah diperkuat, kalau ada gugatan di MK, maka Baleg yang harus menjelaskannya,” pungkasnya.

Tapi kata Afnan, selama ini DPD RI tidak dilibatkan sebagaimana putusan MK. “Jadi, putusan MK itu belum

dilaksanakan. Untuk itu DPD RI membentuk Timja DPD RI yang bertugas untuk menyusun RUU dan mengawal pelaksanaan keputusan MK tersebut. Padahal, dari 141 RUU atau 45,0% adalah terkait dengan daerah dan sudah dikomunikasikan dengan DPR RI. Namun implementasinya belum berjalan dengan baik. Jadi, DPD RI mendukung Baleg diperkuat,” ungkapnya.

Irman Putrasidin mengatakan pasca amandemen UUD 45, maka kewenangan pemegang pembuatan UU itu ada di DPR RI dan Pemerintah, termasuk anggaran (APBN). Dengan begitu, maka kalau Pemerintah dan DPR RI menilai perlu bahwa negara ini membutuhkan aturan perundang-undangan, maka akan diputuskan oleh DPR RI dan Pemerintah. “Kalau nantinya ada yang gugat ke MK atas UU itu, maka Baleg DPR RI yang harus menjawab,” ujarnya. ■

Foto: Adnan



Ketua Baleg DPR RI Supratman Andi Atgas dalam Forum Legislasi



# Jangan Ada Adu Domba Saat Pilkada

Momentum Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2017 ini idealnya dijadikan pesta demokrasi yang sportif, bersih, jujur dan berkeadaban. Pemerintah harus mampu menjadikan kesempatan baik ini sebagai pendidikan politik bagi seluruh lapisan masyarakat. Namun yang terjadi saat ini masih jauh dari kata ideal, informasi tidak jelas berseliweran di tengah-tengah masyarakat, membuat resah bahkan berpotensi mengadu domba, saling tuduh satu sama lain.



Anggota Komisi I DPR RI, Andreas Hugo Pareira

terlarang, yaitu Partai Komunis Indonesia (PKI). Dalam rapat kerja yang dipimpin Wakil Ketua Komisi I DPR RI TB Hasanuddin.

"Kita setuju, kita sepakat, bahwa yang namanya bahaya laten komunis ini perlu kita waspadai. Meskipun kita ketahui di dunia ini induk semangatnya sekarang sudah mati suri, bahkan ada yang sudah tidak kelihatan bekasnya lagi," ujar Politikus PDI Perjuangan itu.

Berkali-kali dia meminta kepada Menteri Pertahanan dan Panglima TNI agar jangan sampai masyarakat diadu domba hanya karena persaingan politik yang tidak sehat. "Kalau memang ada ya bagaimana kita mengatasi, menindaklanjuti apa yang kita maksud bahaya laten

komunis. Kalau tidak ada, jangan dijadikan ini sebagai isu mengadu domba masyarakat kita," kata Andreas.

Menurutnya, isu yang berkembang di masyarakat mengarah pada upaya saling tuduh antar kelompok. Dengan demikian, dia meminta Menhan agar menjelaskan persoalan bangkitnya komunisme. Kalau memang isu tersebut benar adanya maka harus ada tindakan dan jangan dibiarkan, karena komunis adalah bahaya laten.

Andreas menjelaskan, menjelang pilkada semua isu dapat dipolitisasi untuk kepentingan tertentu. "Maksud kita memang baik, tapi kemudian ini digiring bisa membahayakan masyarakat kita,"katanya.

Politisi PDI Perjuangan ini menambahkan, dirinya tidak ingin isu kebangkitan paham komunis atau Partai Komunis Indonesia (PKI) di Indonesia dijadikan alat untuk mengadu domba masyarakat. Hal ini lantaran dalam beberapa kesempatan Ryamizard mengatakan adanya potensi paham komunis kembali bangkit di Indonesia. Rapat Kerja Komisi I dengan Menhan dan Panglima TNI yang awalnya terbuka untuk umum kemudian digelar secara tertutup. ■

Anggota Komisi I DPR RI, Andreas Hugo Pareira menegaskan kepada Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu dan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo, agar mampu berperan memberikan suasana yang aman dan tenang bagi masyarakat. Jangan sampai persaingan politik yang tidak sehat, seperti isu kebangkitan komunisme mengadu domba masyarakat.

"Tapi apabila tidak ada, jangan ini dijadikan sebagai isu mengadu domba masyarakat kita. Apalagi saat ini menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), terutama untuk DKI Jakarta. Ini digiring bisa membahayakan masyarakat kita," tandasnya.

Penegasan tersebut dia sampaikan saat Rapat Kerja Komisi I DPR RI dengan Menteri Pertahanan dan Panglima TNI, di ruang sidang Komisi I, Nusantara II, Senin (6/2). Andreas Hugo mempertanyakan isu kebangkitan partai

Idealnya  
dijadikan  
pesta demokrasi  
yang sportif,  
bersih,  
jujur dan  
berkeadaban.



# Indonesia Harus Menjadi Negara Volunteer Terbesar di Dunia

Indonesia harus menjadi negara volunteer terbesar di dunia dengan menciptakan warga negara yang siap menjadi sukarelawan dan relawan kelas dunia. Apalagi jika melihat kondisi dunia saat ini yang mengalami banyak konflik, krisis kemanusiaan, hingga perang dimana-mana. Maka sebagai bangsa besar, Indonesia harus hadir dengan motif tangan di atas yaitu membantu, bukan hanya sekedar meminta.

**D**emikian ditegaskan Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah saat mendampingi Komisi IX melakukan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Ketua Umum Palang Merah Indonesia (PMI) Jusuf Kalla. Maka dari itu, pihaknya berharap DPR RI dapat segera menyelesaikan perbedaan pendapat mengenai lambang pada RUU Kepalaangmerahan.

"Soal lambang seperti saran dari Ketua Umum PMI, kita terima lambang palang merah itu karena itu telah menjadi lambang ketika PMI didirikan dari awal. Tetapi saya setuju kalau memang ada pengembangan ide, atau pengembangan lingkup Indonesia

yaitu tangannya harus berada di atas," kata Fahri di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (08/02).

Maka dari itu, lanjut politisi F-PKS itu, dalam RUU Kepalaangmerahan itu harus ada pasal yang mengatur kewajiban kita sebagai bangsa menjadi volunteer.

"Kegiatan kemanusiaan dan volunteerisme kemanusiaan harus dicantumkan sebagai kegiatan warga negara yang difasilitasi oleh lembaga seperti PMI dan lembaga lainnya," imbuh Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat itu.

Masih kata Fahri, pihaknya juga siap memfasilitasi pertemuan untuk menyinkronkan

Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU Kepalaangmerahan, agar tidak terlalu banyak kesulitan. Sebab dimasa yang krisis ini, ia menilai RUU itu harus segera di selesaikan untuk dapat membantu menyelesaikan permasalahan dalam negeri dan luar negeri.

"Ini harus segera, karena sangat dibutuhkan kemanusiaan. Yang perlu dipikirkan saat ini adalah bagaimana cara mengakomodir kaum muda. Negara perlu membantu memfasilitasi dengan traning supaya Indonesia siap menjadi bangsa dengan relawan terbesar di dunia. Sehingga kita bisa terlibat dalam krisis-krisis global yang nampaknya akan dihadapi di depan," tutup politisi asal dapil NTB itu. ■

femmi foto rekam



Ketua Komisi IX DPR RI, Dede Yusuf



# Perbaikan Tata Kelola Jadi Prioritas Perguruan Tinggi Baru

Kunjungan kerja spesifik Komisi X DPR RI ke Provinsi Kalimantan Timur meninjau sarana dan prasarana di Institut Teknik Kalimantan (ITK) serta berdialog dengan jajaran civitas akademika Politeknik Negeri Kalimantan. Wakil Ketua Komisi X DPR RI Sutan Adil Hendra menyampaikan ada dua permasalahan yang mendesak untuk diatasi oleh Kementerian Riset dan Pendidikan Tinggi, yaitu kebutuhan sarana dan prasarana kampus serta ketersediaan SDM Dosen yang kompeten.

**K**etua Tim Kunspek ini menjelaskan ITK dan Politeknik Negeri Kalimantan sebagai kampus baru belum diperhatikan secara serius oleh Kemenristek Dikti akibatnya tata kelola perguruan tinggi ini masih banyak kekurangan. "Masih kurang tata kelola dari perguruan tinggi yang baru ini. Tata Kelola ini menjadi skala prioritas," ujar Sutan di kampus ITK, Balikpapan, Jumat (03/02) sore.

Dosen dan tenaga kependidikan PTN Baru memang telah diatur dalam Perpres No. 10 tahun 2016 tentang Dosen dan Tenaga Kependidikan pada PTN Baru, tinggal realisasinya belum terlaksana secara baik. Sedangkan untuk sarana dan prasarana (Sarpras) PTN Baru, masih belum menjadi perhatian.



Tim Kunspek Komisi X DPR RI meninjau sarpras di Institut Teknik Kalimantan (ITK)

Setelah meninjau langsung ke lapangan dan berdialog dengan jajaran civitas akademika kampus, Sutan menekankan pemerintah perlu melakukan pembenahan Sarpras yang signifikan serta ketersediaan dosen pengajar.

"Ternyata setelah kita melakukan pertemuan dengan jajaran yang ada di ITK ini, perlu

pembenahan yang signifikan, terutama sarana dan prasarannya. Yang kedua rasio dosen yang tidak memungkinkan. Telah kita lihat dari 10 prodi yang ada, ada tiga prodi yang belum ada dosen yang membidangi itu," jelas Sutan.

Dalam Pasal 41 ayat (3) UU Pendidikan Tinggi menyatakan bahwa perguruan tinggi menyediakan Sarpras untuk memenuhi keperluan pendidikan sesuai dengan bakat, minat, potensi, dan kecerdasan mahasiswa. Penyediaan Sarpras dalam rangka memenuhi fungsi dan peran perguruan tinggi sebagaimana amanat Pasal 58 UU Pendidikan Tinggi. ■

(eko.ampj, foto : eko/hr)



Masterplan Institut Teknologi Kalimantan - Balikpapan

<http://www.ilmusipil.com>

## Kemenaker Diminta Tingkatkan Pengawasan Wisman yang Jadi TKA

Komisi IX DPR RI mendesak Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) untuk meningkatkan pencegahan dan pengawasan orang asing dari wisatawan mancanegara yang menjadi Tenaga Kerja Asing (TKA).

“Kemenaker untuk meningkatkan pencegahan dan pengawasan orang asing dari wisatawan mancanegara”

dari persoalan perbudakan dan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), Komisi IX DPR RI mendesak Kemenaker untuk segera membuat regulasi yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2016 tentang pengesahan MLC 2006 dan peraturan perundang-undangan lainnya.

Kementerian Ketenagakerjaan juga diminta untuk memanfaatkan peran BLK di daerah dalam rangka meningkatkan kualitas TKI melalui peningkatan anggaran. "Kita minta Kemenaker untuk melakukan kerjasama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Kementerian Dalam Negeri dalam rangka peningkatan mutu BLK sehingga menjadi program unggulan yang dapat menciptakan pekerja yang professional," ungkapnya.

Politisi Demokrat ini juga mendesak Kemenaker untuk melaksanakan rekomendasi Panja Pengawasan TKA dan Panja Pengupahan Komisi IX DPR RI guna menyelesaikan permasalahan Pengawasan TKA dan permasalahan pengupahan sesuai ketentuan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. ■

(mm.mpi.foto : Rizka/Pr

Ketua Komisi IX DPR RI, Dede Yusuf

Hal tersebut diungkapkan Ketua Komisi IX DPR RI Dede Yusuf Macan Effendi saat membacakan kesimpulan rapat kerja dengan Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri di Gedung Nusantara I, DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (06/02).

Komisi IX DPR RI juga mendesak Kemenaker berkoordinasi untuk diikutsertakan dalam seluruh kesepakatan yang dilakukan oleh kementerian dan BUMN, Kementerian Perindustrian RI dan BKPM RI terkait investasi

dan proyek infrastruktur yang menyertakan pekerja asing.

Masih kata Politisi Demokrat itu, pihaknya juga mendesak Kemenaker untuk meningkatkan koordinasi dengan Kementerian Luar Negeri, Dirjen Imigrasi Kemenkumham dan BNP2TKI untuk segera memberi penyelesaian dokumen legal kepada TKI non prosedural di luar negeri sehingga kejadian tenggelamnya kapal pengangkut TKI tidak terjadi lagi.

Untuk melindungi Anak Buah Kapal (ABK)



# DPR RI Apresiasi Karya Mahasiswa Poltek Batam

Tim Kunjungan Spesifik Komisi X DPR RI ke Kepulauan Riau, Batam, Jumat (03/02) berkesempatan meninjau sarana dan prasarana Politeknik Negeri Batam. Dari hasil kunjungan ke beberapa laboratorium itu, Wakil Ketua Komisi X DPR RI Ferdiansyah mengapresiasi inovasi mahasiswa Poltek Batam.



Tim Kunspek Komisi X DPR RI meninjau Laboratorium Politeknik Negeri, Batam

"Kita melihat Poltek Batam relatif cukup bagus, karena beberapa peralatan sudah memadai, tinggal yang perlu kita sampaikan kepada Kemnristek Dikti adalah kemanfaatan laboratorium yang ada di Poltek Batam untuk bisa digunakan oleh perguruan tinggi lain," kata Ferdiansyah.

Politisi F-PG itu menjelaskan, mahasiswa Poltek Batam bisa membuat micro chip yang ada di kartu mahasiswa, hal itu perlu dikembangkan dan diarahkan agar sejalan dengan industri yang ada di Indonesia.

"Ini merupakan suatu kemajuan yang cukup bagus, sehingga semua kartu mahasiswa yang menggunakan micro chip bisa diproduksi di dalam

negeri. Manfaat peninjauan ini supaya produk yang dilakukan sesuai dengan kebutuhan industri khususnya yang ada di Indonesia," ujarnya.

Dalam melihat aktivitas penunjang kegiatan Poltek itu, Ferdiansyah bertanya tentang mesin-mesin yang tersedia di labor, mulai penggunaan, harga sampai bahan baku untuk produksi sebuah peralatan. Pihaknya juga melihat tempat latihan perbaikan mesin pesawat terbang.

Hal senada juga disampaikan Anggota Komisi X DPR RI Mujib Rohmat yang mengusulkan agar produksi yang dihasilkan mahasiswa Poltek Batam bisa di patenkan, sebab inovasi yang diciptakan mahasiswa Teaching

Factory Manufaktur Elektronika belum ada tandingannya di Batam.

"Politeknik ini sudah menghasilkan beberapa karya yang cukup bagus. Microchip yang dihasilkan multiguna dan belum ada tandingannya di beberapa tempat oleh karena itu saya usulkan agar karya ini segera di patenkan," kata Mujib

Pihaknya juga meminta pemerintah memberi perhatian dan apresiasi, agar inovasi yang dihasilkan mahasiswa Poltek Batam itu dapat dikembangkan. "Perlu ada kerjasama dengan pemerintah dan pengusaha agar ini bisa dikembangkan dan hasilnya bisa bermanfaat bagi masyarakat Indonesia," ujarnya. ■



Pertemuan Tim Kunspek Panja Kesejahteraan Prajurit TNI Komisi I dipimpin Ketua Abdul Kharis Almayshari dengan Panglima Komando Armada RI Kawasan Timur di Surabaya, Kamis (2/2). Foto: Iwan

Tim Kunspek Komisi X DPR dipimpin Wakil Ketua Abdul Fikri Faqih meninjau Gedung Sekolah SMKN 5 yang rusak parah dan tidak terawat di Palangka Raya, Jum'at (3/2). Foto: Eka



Tim Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara dipimpin Drs. Helmizar ME, mengadakan pertemuan dengan Ketua Program S2 Fisip Undip Semarang, DR. Teguh Yuwono, M.Pol. dan Sekda Kota Semarang. Dalam rangka diskusi mengenai hasil temuan BPK (9-10/2)